

## BUPATI MAMBERAMO TENGAH PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

# PERATURAN BUPATI MAMBERAMO TENGAH NOMOR 15 TAHUN 2025 TENTANG

## RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PERUBAHAN (RKPD-P)

#### **TAHUN 2025**

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MAMBERAMO TENGAH,

#### Menimbang

- a. bahwa untuk menjamin agar pelaksanaan pembangunan berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran sehingga terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran dan pengawasan serta untuk menciptakan kemandirian dalam rangka pembangunan daerah yang memperhatikan prinsip prinsip demokratis, partisipasi masyarakat, pemerataan, keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Mamberamo Tengah Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (RKPD-P) Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2025;

## Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 3851);
- 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undangundang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

- Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Jangka Panjang Nasional Tahun 2005– 025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 6. Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
- Undang Undang Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Mamberamo Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4802);
- 8. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- 10. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6805);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah

- Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 temtang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6863);
- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 115);
- 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang
  Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik
  Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

- 21. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
- 22. Peraturan Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 1 Tahun 2025 tentang APBD Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun Anggaran 2025 (Lambaran Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2025 Nomor 1);
- 23. Peraturan Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,2 9,30,31,32,33 dan 34 Tahun 2016 tentang Susunan Stuktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Inpektorat, Oranisasi Perangkat Daerah dan Jabatan Staf Ahli Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah (Berita Daerah Kabupaten Tahun 2016 Mamberamo Tengah Nomor 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,2 9,30,31,32,33 dan 34);
- Peraturan Bupati Mamberamo Tengah Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2024 Nomor 13);
- Peraturan Bupati Mamberamo Tengah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2025 Nomor 2);

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MAMBERAMO TENGAH TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PERUBAHAN (RKPD-P) KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH TAHUN 2025.

#### Pasal 1

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (RKPD-P) Tahun 2025 terdiri atas :

### BAB I Pendahulan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Hubungan Antar Dokumen
- 1.4 Maksud dan Tujuan
- 1.5 Sistematika Penulisan

BAB II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Semester Pertama Tahun 2025

BAB III Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah

BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

BAB VI Penutup

### Pasal 2

Penjabaran RKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

### Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah.

Ditetapkan Kobakma

Pada Tanggal 19 September 2025

BUPATI MAMBERAMO TENGAH,

YONAS KENELAK, S Sos

Diundangkan di Kobakma pada tanggal, 19 September 2025

RIL SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH,

FEDY JAMAU, SE, M.SI

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH TAHUN 2025

**NOMOR**